



DOKUMEN RENCANA KERJA

RENJA AKHIR TAHUN 2026

**DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KOTA PROBOLINGGO¹**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya semata, akhirnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo Tahun 2026 ini dapat kami susun dan diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo Tahun 2026 ini telah tercermin dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dengan telah selesainya Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo Tahun 2026 ini, kami berharap dapat menjadikan tolak ukur keberhasilan pelaksanaan tugas operasional Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo. Kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo Tahun 2026 ini, oleh karenanya kami sangat berterima kasih atas saran dan kritik yang ada demi perbaikan di masa mendatang.

KERALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
TENAGA KERJA KOTA PROBOLINGGO



BUDIONO WIRAWAN, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda

Nip. 19691220 199003 1 009

1.1 Latar Belakang

Merujuk pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam rangka pengintegrasian dan harmonisasi program dan kegiatan prioritas sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat serta untuk mengharmoniskan dan menyinergikannya terhadap prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan provinsi. maka disusunlah Rencana Kerja Perangkat Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berisi program kegiatan dan anggaran yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Rencana Kerja berfungsi sebagai panduan operasional untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Probolinggo Tahun 2025-2026, bahwa Tema Pembangunan Kota Probolinggo Tahun 2026 yaitu “Peningkatan Ekosistem Ekonomi, Sosial, Tata Kelola dan Lingkungan Yang Didorong Infrastruktur Berkelanjutan”. Tema dimaksud menitikberatkan pada usaha peningkatan ekosistem dalam rangka menunjang pelaku usaha untuk dekat dengan pemasaran dengan didukung infrastruktur yang berkelanjutan. Tema pembangunan dimaksud kemudian akan disinkronkan dengan prioritas dan kebijakan pembangunan nasional serta Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 sebagaimana amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 77. Hasil dari sinkronisasi kebijakan dalam RKPD Kota Probolinggo kemudian ditindaklanjuti melalui Verifikasi dan Integrasi Program & Kegiatan Prioritas, dengan tujuan pokok adalah menyangkut kesamaan materi antara program dan kegiatan prioritas pada rancangan RKPD, dengan program dan kegiatan prioritas tiap-tiap Perangkat

Daerah, termasuk informasi tentang indikator kinerja, selain itu juga memastikan agar program dan kegiatan prioritas telah sepenuhnya tercantum dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah. Dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka Perencanaan Rencana Kerja Tahun 2026 ini akan disusun dengan menggunakan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan serta indikator kinerja sub kegiatan sebagaimana Permendagri dan Kepmendagri dimaksud. Dengan sumber daya yang dimiliki, Pemerintah Kota Probolinggo melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja bertekad untuk mewujudkan tema pembangunan Tahun 2026 tersebut secara efektif dan optimal dalam bentuk program dan kegiatan yang nantinya akan dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2026 untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Adapun tahapan, proses dan jadwal penyusunan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo Tahun 2026 meliputi :

- a. Persiapan Data Pendukung Penyusunan Rencana Kerja
 - Koordinasi antar Bidang di lingkungan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo dan pengumpulan usulan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta anggaran Tahun 2026 pada bulan Desember 2024
 - Koordinasi pengumpulan data dasar capaian kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo pada Desember 2024;
- b. Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Merupakan awal dari seluruh proses penyusunan rancangan awal Rencana Kerja untuk menyusun rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif. Rancangan awal Rencana Kerja Tahun 2026 disusun pada periode bulan Januari 2025 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Kota Probolinggo Tahun 2025-2026 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2024
- c. Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perumusan Rancangan

Rencana Kerja pada dasarnya adalah memadukan materi pokok yang telah disusun dalam rancangan awal RKPD dengan rancangan Renja Perangkat Daerah dan mensinkronkannya dengan kebijakan nasional/provinsi pada tahun rencana. Dengan demikian, penyusunan rancangan Rencana Kerja bertujuan untuk menyempurnakan rancangan awal melalui proses pengintegrasian dan harmonisasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum dalam rancangan RKPD Kota Probolinggo serta untuk mengharmoniskan dan menyinergikannya terhadap prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan provinsi. Rancangan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo Tahun 2026 diagendakan untuk disusun pada Minggu Ke- 2 bulan Januari 2025 hingga Minggu Pertama bulan Februari 2024.

- d. Pelaksanaan Musrenbang Pelaksanaan Musrenbang ditujukan untuk membahas rancangan RKPD kabupaten/kota guna memperoleh saran/masukan dan penyepakatan dari para pemangku kepentingan terkait permasalahan, prioritas pembangunan, program, kegiatan, pagu indikatif, indikator kinerja serta target kinerja daerah. Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Musrenbang RKPD Kabupaten / Kota harus dilaksanakan maksimal akhir Maret Tahun n-1. Hasil Musrenbang tersebut akan menjadi dasar bagi Perangkat Daerah untuk mengakomodir usulan para pemangku kepentingan. Pengakomodiran Usulan Musrenbang tersebut dilakukan oleh Perangkat Daerah pada Minggu ke-3 Bulan Februari 2025
- e. Perumusan Rancangan Akhir Rencana Kerja Berdasarkan hasil dari Musrenbang Kota Probolinggo yang telah dilaksanakan, maka dilakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Rencana Kerja. Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo Tahun 2026 mengacu pada Rencana Kerja Akhir Pemerintah Daerah Kota Probolinggo.
- f. Penetapan Rencana Kerja Penetapan Rencana Kerja dilakukan setelah melalui proses verifikasi Rencana Kerja Perangkat Daerah oleh Bappeda Litbang Kota Probolinggo.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA), sejumlah peraturan telah digunakan sebagai dasar, yaitu :

1. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional
7. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Dan RPJMD Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, Dan RKPD.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 6);
12. Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025,Nomor 18 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Probolinggo Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2024 Nomor 9); dan;

14. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
15. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 32 Tahun 2025 Tentang RKPD Kota Probolinggo Tahun 2026
16. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga kerjaan;
17. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
18. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 95 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustria dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1.Maksud

- a) Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026 ini disusun dengan maksud :
 - Sebagai dasar dalam penentuan dan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). KUA dan PPAS yang telah disepakati selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam proses penyusunan APBD.
 - Sebagai acuan dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun RKA-Perangkat Daerah Tahun 2026.

Sedangkan tujuan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Probolinggo Tahun 2026 adalah :

- Menjabarkan RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2025-2029 dan sinkronisasi dengan

sasaran dan program RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, ke dalam rencana program kegiatan prioritas Perangkat Daerah Tahun 2026.

- Menciptakan sinergi program kegiatan antara dokumen Renstra dan dokumen Rencana Kerja.
- Memberikan dasar bagi pelaksanaan program, kegiatan dan penganggaran pada Tahun 2026.

1.4 Sistematika Penyusunan

Rencana Kerja Dinas Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo Tahun 2026.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika penulisan

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo Tahun lalu

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD;
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD;
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat;

BAB III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Tahun 2026

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional;
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah;
- 3.3 Program dan Kegiatan;

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dijelaskan mengenai Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;

BAB V Penutup

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Hasil evaluasi pelaksanaan renja memuat tentang hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1). Adapun rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan renja dan pencapaian renstra sampai dengan 2023 sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel T-C.29

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO

Tahun Anggaran 2026

Organisasi : 3.31.2.07.0.00.01.0000 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2023-2025)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) (Tahun 2023-2025)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi renja Perangkat daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi (%)
1					2	3	4	5 (n-3)	6 (n-2)	7 (n-2)	8 = (7/6)	9 (n-1)	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA									
2	07	02			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK) yang ditetapkan	100	0	0	0	0			
2	07	02	2.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	100	0	0	0	0			
2	07	02	2.01	00 01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Paket	0	0	0	0			

2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktifitasnya	90,3 %	100	93	226	326	93,3%	93,3%	100%
2	07	03	2,01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan Fasilitas Pelatihan Berbasis Kompetensi	90,3 %	576	556	540	1116	0	0	100%
2	07	03	2,01	00 01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	512 Orang	576	544	528	1104	48 Orang	48 Orang	100%
2	07	03	2,01	00 02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koord inasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	12 Lembaga	9	12	12	21	12 Kali	12 Kali	100%
2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri	90,3 %	100%	89	53	53	90%	90%	100%
2	07	04	2,01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga Kerja yang mendapatkan	90,3 %	100%	875	402	402	8 Orang	8 Orang	100%

						Fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja								
2	07	04	2,01	00 04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	50 Orang	800	0	0	0	50 Orang	50 Orang	100%
2	07	04	2,01	00 05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	20 Orang	20	25	21	41	20 Orang	20 Orang	100%
2	07	04	2,03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan fasilitasi Informasi Pasar Kerja	90,3 %	100%	80	103	103	80%	80%	100%
2	07	04	2,03	00 03	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	130 Orang	125 Orang	125	129	254	130 Orang	130 Orang	100%
2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang menerapkan perlindungan hak - hak pekerja dan dialog sosial	74%	100%	70	51	151	100%	100%	100%
							47%	100%						

2	07	05	2,01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perusahaan yang telah menetapkan Peraturan Perusahaan terkait Hubungan Industrial dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama	100 perusahaan	100%	0	112	212	100%	100%	100%
2	07	05	2,01	00 03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	100 perusahaan	80 Jumlah	100	112	192	100 Perusahaan	100 Perusahaan	100%
2	07	05	2,02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penurunan kasus perselisihan hubungan industrial	7 Kasus	1	79	79	179	79%	79%	100%
2	07	05	2,02	00 01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	7 Kasus	9 Jumlah	12	49	58	12 Perkara	12 Perkara	100%
					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
					URUSAN PEMERINTAHAN									

					BIDANG PERINDUSTRIAN									
2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	76,69 %	0	100	124	224	1	1	100%
3	31	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%	10 laporan	0	100	101	201	1	1	100%
3	07	01	2,01	00 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	0	12	12	22	10 Dokum en	10 Dokumen	100%
3	31	01	2,01	00 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	0	12	12	22	10 Dokum en	10 Dokumen	100%
3	31	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	48 Orang/B ulan	0	100	143	143	100%	100%	100%
3	31	01	2,02	00 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang/bul an	0	12	246	341	61 Orang	61 Orang	100%
3	31	01	2,02	00 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan	12 Dokumen	0	12	174	267	12 Dokum en	12 Dokumen	100%

						Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
3	31	01	2,02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	0	12	12	24	12Laporan	12Laporan	100%
3	31	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi BMD Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	12 Dokumen	0	100	100	100	100%	100%	100%
3	31	01	2,03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	0	12	12	32	12 Laporan	12 Laporan	100%
3	31	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	12 Dokumen	0	100	96	96	100%	100%	100%
3	31	01	2,05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	0	0	0	0	0	0	100%
3	31	01	2,05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Laporan	0	12	12	48	12 Dokumen	12 Dokumen	100%

3	31	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	12 Dokumen	0	100	99	99	100%	100%	100%
3	31	01	2,06	00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	0	12	12	21	12 Laporan	12 Laporan	100%
3	31	01	2,06	00 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	0	12	12	18	12 Laporan	12 Laporan	100%
3	31	01	2,06	00 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	0	12	12	84	12 Laporan	12 Laporan	100%
3	31	01	2,06	00 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	0	12	12	18	12 Laporan	12 Laporan	100%
3	31	01	2,06	00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	0	12	12	62	12 Laporan	12 Laporan	100%
3	31	01	2,06	00 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	0	12	12	112	12 Laporan	12 Laporan	100%
3	31	01	2,06	00 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	0	12	12	24	12 Laporan	12 Laporan	100%

3	31	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD Perangkat Daerah yang terpenuhi	1 Laporan	0	100	122	222	100%	100%	100%
3	31	01	2,07	00 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0	3	3	36	3 Laporan	3 Laporan	100%
3	31	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Perangkat Daerah yang terpenuhi	12 Dokume n	0		97	97	100%	100%	100%
3	31	01	2,08	00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	0	12	12	24	12 Laporan	12 Laporan	100%
3	31	01	2,08	00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	0	12	12	30	12 Laporan	12 Laporan	100%
3	31	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	12 Dokume n	0	100	93	93	100%	100%	100%
3	31	01	2,09	00 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	19 Unit	0	12	12	26	12 Laporan	12 Laporan	100%
3	31	01	2,09	00 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	0	12	12	112	12 Laporan	12 Laporan	100%
3	31	01	2,09	00 09	Pemeliharaan/Rehabilitas i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	1 Unit	0	2	2	3	2 Unit	2 Unit	100%

						Dipelihara/Direhabilitasi								
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN									
3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Realisasi Investasi Sektor industri dan Kawasan Industri	84%		83	83	83	83,5%	83,5%	100%
3	31	02	2,01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase Rencana Pembangunan Industri yang dilaksanakan	84%	0	1	1	1	83,5%	83,5%	100%
3	31	02	2,01	00 03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	5 Dokumen	100	100	100	100	4 Dokum en	4 Dokumen	100%
3	31	02	2,01	00 04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	9 Dokumen	30	45	45	45	8 Dokum en	8 Dokumen	100%
3	31	02	2,01	00 05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	2 Dokumen	30	30	30	30	2 Dokum en	2 Dokumen	100%

3	31	02	2,01	00 06	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	1	1	1	1	1 Dokum en	1 Dokumen	100%
3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	83%	0	82	82	82	82,5%	82,5%	100%
3	31	03	2,01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang diterbitkan sesuai ketentuan	83%	0	82	82	82	82,5%	82,5%	100%
3	31	03	2,01	00 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang	11 Dokumen	0	82	82	82	10 Dokum en	10 Dokumen	100%

						usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat								
3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	83	81	82	82	82	82,5%	82,5%	100%
3	31	04	2,01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Data Industri yang dikelola dengan SIINAS (Sistem Informasi Industri Nasional)	83	81	82	82	82	82,5 %	82,5 %	100%
3	31	04	2,01	00 01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	4 Dokumen	4	82	82	82	4 Dokumen	4 Dokumen	100%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

Pada Tahun 2026 Indikator Kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sebagaimana telah ditetapkan, dapat dilihat pada tabel berikut :

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KOTA PROBOLINGGO

Tabel TC.30

NO	Indikator (IKU OPD)	SPM / standar nasional (bila ada)	IKK (bila ada)	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Peningkatan Nilai Produksi Sektor Industri		Persentase Peningkatan Nilai Produksi Sektor Industri	50M	50M	50M	50M	99.94%		-	-	
2	Prosentase Peningkatan Nilai Produksi Sektor Industri		Persentase Peningkatan Nilai Produksi Sektor Industri							0,90%	0,91%	
3	Persentase Pencari kerja yang ditempatkan pada sektor Formal dan Informal		Persentase Pencari kerja yang ditempatkan pada sektor Formal dan Informal	98,3 %	90%	90,3%	90,6%	100 %	na	-	-	
4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)		Prosentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)							71,05 %	71,09%	
5	Persentase perusahaan yang memenuhi persyaratan kerja		Persentase perusahaan yang memenuhi persyaratan kerja	70%	72%	74%	76%	130%	na	74%	76%	
6	Persentase penurunan kasus perselisihan hubungan industrial			57%	52%	51%	50%	19%	na	51%	50%	
7	Cakupan Kepersertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan		Cakupan Kepersertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan							64,45%	66,32%	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo

Isu-isu strategis atau kondisi harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa mendatang. Apabila kondisi yang menjadi isu strategis tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang besar dan menghilangkan peluang bagi peningkatan layanan kepada masyarakat.

PERMASALAHAN & ISU – ISU STRATEGIS :

Urusan Perindustrian :

1. Belum optimalnya nilai tambah produksi sektor industri
2. Kurangnya daya saing produk

Urusan Tenaga Kerja

1. Lapangan pekerjaan belum dapat menampung kebutuhan pencari kerja, termasuk bagi kelompok disabilitas
2. Masih adanya kasus perselisihan hubungan industrial

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan daerah (RKPD) Tahun 2026, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo menetapkan program prioritas sebagai berikut :

Tabel T-C.31.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026 Kota
Probolinggo

DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA PROBOLINGGO

No	Rancangan Awal RKPD					Rancangan Awal RKPD				
	Program/Kegiatan 2026	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan 2026	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
					(Rp.000)					(Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Kota Probolinggo			14.670.769.588	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Kota Probolinggo			14.670.769.588
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Probolinggo	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	76,69 %	8.428.842.572	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Probolinggo	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	76,69 %	8.428.842.572

	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Probolinggo	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%	100 %	47.139.592	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Probolinggo	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%	100 %	47.139.592
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Probolinggo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	35.089.592	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Probolinggo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	35.089.592
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Probolinggo	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10	12.050.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Probolinggo	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10	12.050.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Probolinggo	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	48 Orang/Bulan	7.614.819.220	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Probolinggo		48 Orang/Bulan	7.614.819.220

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Probolinggo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang/Bulan	7.467.744.628	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Probolinggo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang/Bulan	7.467.744.628
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Probolinggo	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	118.109.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Probolinggo	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	118.109.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Probolinggo	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12	28.965.592	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Probolinggo	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12	28.965.592

	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Probolinggo	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi BMD Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	12	6.350.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Probolinggo	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi BMD Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	12	6.350.000
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Probolinggo	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	6.350.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Probolinggo	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	6.350.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Probolinggo	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat	12	17.150.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Probolinggo	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawai	12	17.150.000

			Daerah Sesuai Ketentuan					an Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan		
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kota Probolinggo	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12	900.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kota Probolinggo	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12	900.000
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Probolinggo	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	16.250.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Probolinggo	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	16.250.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Probolinggo	Jumlah Dokumen/Lapo ran Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	12	146.439.360	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen/L aporan Administras i Umum Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	12	146.439.360
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Probolinggo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	39.119.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Probolinggo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	39.119.000

	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Probolinggo	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	2.500.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Probolinggo	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	2.500.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Probolinggo	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12	15.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Probolinggo	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12	15.000.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Probolinggo	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4	5.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Probolinggo	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4	5.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Probolinggo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	58.090.360	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Probolinggo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	58.090.360
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Probolinggo	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	1.500.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Probolinggo	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	1.500.000

	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Probolinggo	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12	25.230.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Probolinggo	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12	25.230.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Probolinggo	Jumlah Dokumen/Laporan BMD Perangkat Daerah yang terpenuhi	1	15.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Probolinggo	Jumlah Dokumen/Laporan BMD Perangkat Daerah yang terpenuhi	1	15.000.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Probolinggo	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	15.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Probolinggo	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10	15.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Probolinggo	Jumlah Dokumen/Laporan Kebutuhan Ketatalaksanaan yang Terpenuhi	12	427.932.760	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Probolinggo	Jumlah Dokumen/Laporan Kebutuhan Ketatalaksanaan yang Terpenuhi	12	427.932.760
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Probolinggo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	118.890.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Probolinggo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	118.890.000

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Probolinggo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	309.042.760	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Probolinggo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	309.042.760
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Dokumen/Laporan BMD dalam kondisi baik	12	154.011.640	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Dokumen/Laporan BMD dalam kondisi baik	12	154.011.640
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan	Kota Probolinggo	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	19	63.311.640	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan	Kota Probolinggo	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	19	63.311.640
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Probolinggo	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40	15.700.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Probolinggo	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40	15.700.000

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Probolinggo	Jumlah Paket Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	75.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Probolinggo	Jumlah Paket Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	75.000.000
	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Kota Probolinggo	Persentase Dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK) yang ditetapkan	100	85.000.000	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Kota Probolinggo	Persentase Dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK) yang ditetapkan	100	85.000.000
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Kota Probolinggo	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	100	85.000.000	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Kota Probolinggo	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	100	85.000.000

	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Kota Probolinggo	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 paket	85.000.000	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Kota Probolinggo	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 paket	85.000.000
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro		Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Paket	85.000.000	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro		Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Paket	85.000.000
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Kota Probolinggo	Persentase Pencari Kerja dan Tenaga Kerja yang Mendapatkan Fasilitas Pelatihan dan Peningkatan Produktivitas (formal)	90.3	3.633.723.511	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Kota Probolinggo	Persentase peningkatan Pelatihan dan produktifitas tenaga kerja	90.3	3.633.723.511
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan Fasilitas Pelatihan Berbasis Kompetensi	90.3	3.633.723.511	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		Persentase sertifikat pelatihan yang diterbitkan sesuai dengan kompetensinya	90.3	3.633.723.511

	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	16	3.416.854.327	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	16	3.416.854.327
	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja		Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	12	216.869.184	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja		Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	12	216.869.184
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Kota Probolinggo	Persentase Tenaga Kerja yang mendapatkan Fasilitas Penempatan Tenaga Kerja (formal)	90.3	152.752.000	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Kota Probolinggo	Persentase penempatan tenaga kerja	90.3	152.752.000

	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan Fasilitas Pelayanan Antar Kerja	90.3	112.752.000	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan Fasilitas Pelayanan Antar Kerja	90.3	112.752.000
	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Kota Probolinggo	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang mendapatkan fasilitas layanan ULD	50	36.932.650	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Kota Probolinggo	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang mendapatkan fasilitas layanan ULD	50	36.932.650
	Perluasan Kesempatan Kerja	Kota Probolinggo	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	25	75.819.350	Perluasan Kesempatan Kerja	Kota Probolinggo	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	25	75.819.350
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Kota Probolinggo	Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan fasilitas Informasi Pasar Kerja	80	40.000.000	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Kota Probolinggo	Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan fasilitas Informasi Pasar Kerja	80	40.000.000
	Job Fair/Bursa Kerja	Kota Probolinggo	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	125	40.000.000	Job Fair/Bursa Kerja	Kota Probolinggo	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	125	40.000.000

	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Kota Probolinggo	Persentase Perusahaan yang taat aturan ketenagakerjaan	72	2.370.451.505	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Kota Probolinggo	Persentase Perusahaan yang taat aturan ketenagakerjaan	72	2.370.451.505
			Persentase penurunan perselisihan hubungan industrial	52				Persentase penurunan perselisihan hubungan industrial	52	
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Persentase Perusahaan yang telah menetapkan Peraturan Perusahaan terkait Hubungan Industrial dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama	130	2.269.431.500	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah perusahaan yang mendapatkan fasilitasi pemenuhan persyaratan kerja	130	2.269.431.500

	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Kota Probolinggo	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	80	2.269.431.500	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Kota Probolinggo	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	80	2.269.431.500
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase penurunan kasus perselisihan hubungan industrial	79	101.020.005	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase penurunan kasus perselisihan hubungan industrial	79	101.020.005

	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah		Jumlah Perselisihan yang Dicegah	7	101.020.005	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah		Jumlah Perselisihan yang Dicegah	7	101.020.005
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Kota Probolinggo			769.311.048	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Kota Probolinggo			769.311.048
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Kota Probolinggo	Persentase Kebutuhan Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Industri yang Difasilitasi	82	744.613.121	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Kota Probolinggo	Persentase Kebutuhan perencanaan dan evaluasi pembangunan industri yang difasilitasi	82	744.613.121
	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Persentase Rencana Pembangunan Industri yang dilaksanakan	82	744.613.121	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Persentase Rencana Pembangunan Industri yang dilaksanakan	82	744.613.121

	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kota Probolinggo	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	4	64.079.184	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kota Probolinggo	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	4	64.079.184
--	--	------------------	---	---	------------	--	------------------	---	---	------------

	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kota Probolinggo	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	8	662.012.159	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kota Probolinggo	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	8	662.012.159
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kota Probolinggo	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	2	16.871.778	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kota Probolinggo	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	2	16.871.778
	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Kota Probolinggo	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1	1.650.000	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Kota Probolinggo	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1	1.650.000

	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI		Persentase Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang diterbitkan sesuai ketentuan	60	11.628.097	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI		Persentase Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang diterbitkan sesuai ketentuan	60	11.628.097
--	---	--	--	-----------	-------------------	---	--	--	-----------	-------------------

	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Persentase Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang diterbitkan sesuai ketentuan	60	11.628.097	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Persentase Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang diterbitkan sesuai ketentuan	60	11.628.097
--	--	-------------------------	--	-----------	-------------------	--	-------------------------	--	-----------	-------------------

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	10	11.628.097	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	10	11.628.097
--	------------------	--	----	------------	--	------------------	--	----	------------

	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Kota Probolinggo	Persentase Data Industri yang dikelola dengan SIINAS (Sistem Informasi Industri Nasional)	70	13.069.830	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Kota Proboling go	Persentase Data Industri yang dikelola dengan SIINAS (Sistem Informasi	70	13.069.830
								Industri Nasional)		
	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Persentase Data Industri yang dikelola dengan SIINAS (Sistem Informasi Industri Nasional)	70	13.069.830	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Proboling go	Persentase pelaku industri yang menyapai kan laporan data industri	70	13.069.830

	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Kota Probolinggo	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	4	13.069.830	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Kota Probolinggo	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	4	13.069.830
JUMLAH					15.440.080.636	JUMLAH				15.440.080.636

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tahun 2026 Walikota Probolinggo mempunyai tema pembangunan yaitu “Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Pangan Sebagai Dasar Pembangunan Sosial Ekonomi Produktif dan Inklusif ”

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja mengampu 2 (dua) Misi Pembangunan Kota Probolinggo yaitu :

- 1. Pembangunan Ekonomi yang Berdaya Saing Berbasis Sektor Potensial
- 2. Sumber daya manusia dan kesejahteraan sosial yang berkualitas;

Adapun strategi dan arah kebijakan yang digunakan oleh Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo dalam mendukung Prioritas pembangunan Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	URAIAN KEGIATAN
1	Peningkatan Kemandirian masyarakat sebagai upaya percepatan sektor ekonomi produktif	Meningkatkan Kemandirian Industri Kecil Menengah melalui fasilitasi pengembangan dan penguatan daya saing usaha	1. Pembinaan dan Pelatihan Peningkatan ualitas Produk IKM 2. Fasilitasi HAKI (Hak atas Kekayaan Intelektual)	- Memberikan Pendampingan, Pembinaan dan Pelatihan Pengembangan Produk IKM - Fasilitasi Perizinan IKM - Fasilitasi Sarana Pemasaran Produk IKM - Pelaporan Data Industri pada Sinas
2	Pemantapan kualitas Sumber Daya Manusia yang berorientasi pada pasar tenaga kerja	Mewujudkan penurunan jumlah pengangguran serta hubungan industrial yang kondusif	1. Program Penempatan, perluasan, pelatihan dan produktifitas tenaga kerja; 2. Program Penempatan Tenaga Kerja 3. Hubungan Industrial	- Memberkan pelatihan kerja yang banyak tepat - Mengadakan MOU dengan BLK dan LPK swasta, - Mengoptimalka n kerjasama dengan perusahaan terkait permintaan lowongan kerja - pendampingan masalah ketegakerjaan/hubungan industrial

Selain program dan kegiatan yang diusulkan oleh Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo untuk perencanaan pembangunan juga mengakomodir usulan program kegiatan yang berasal dari bawah / masyarakat (bottom up).

Tabel T-C.32

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2026
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA PROBOLINGGO

No.	Program/Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Alasan	Catatan
		Alamat	Kelurahan				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)
1	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA / Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Probolinggo	-		1 paket	Belum Pernah Ikut pelatihan	
		Probolinggo	-		1 paket	Belum Pernah Ikut Pelatihan	
		Probolinggo	Kelurahan Kademangan		1 paket	AMIK MU'ANI (Untuk memenuhi kebutuhan pelatihan bagi warga Kelurahan Kademangan)	
		Probolinggo	Kelurahan Kademangan		1 paket	ELIK DARMAWATI (Untuk memenuhi kebutuhan pelatihan bagi warga Kelurahan Kademangan)	
		Probolinggo	Kelurahan Kademangan		1 paket	RINO BUDI SANTOSO (Untuk memenuhi kebutuhan pelatihan bagi warga Kelurahan Kademangan)	
		Probolinggo	Kelurahan Kademangan		1 paket	YUNITA LELY HALIMATUS SA'DIYAH (Untuk memenuhi kebutuhan pelatihan bagi warga Kelurahan Kademangan)	
		Probolinggo	-		1 paket	Upaya peningkatan produktivitas warga berpotensi	
		Probolinggo	-		1 paket	Minim Operator Komputer Bagi pencari kerja Berbasis Masyarakat (RUDIK PUJIONO)	
		Probolinggo	Kelurahan Kademangan		1 paket	SUMIATI (Untuk memenuhi kebutuhan pelatihan bagi warga Kelurahan Kademangan)	
		Probolinggo	Kelurahan Kademangan		1 paket	HOLIFAH (Untuk memenuhi kebutuhan pelatihan bagi warga Kelurahan Kademangan)	
		Probolinggo	-		1 paket	Kurangnya pengetahuan dalam menjahit (MUSRIPA)	

		Probolinggo	-		1 paket	Menambah pengetahuan terkait otomotif khususnya roda dua a.n. Muchammad Agung Cahyono	
		Probolinggo	-		1 paket	'Ingin menambah ilmu pengetahuan dalam hal Salon kecantikan dan Wirausaha	
		Probolinggo	-		1 paket	Upaya peningkatan produktivitas warga berpotensi	
		Probolinggo	Kelurahan Kademangan		1 paket	YENI ERNAWATI (Untuk memenuhi kebutuhan pelatihan bagi warga Kelurahan Kademangan)	
		Probolinggo	Kelurahan Kademangan		1 paket	MUHAMMAD ZULKARNAEN (Untuk memenuhi kebutuhan pelatihan bagi warga Kelurahan Kademangan)	
		Probolinggo	Kelurahan Kademangan		1 paket	JAZA ANIL CHUSNIAH (Untuk memenuhi kebutuhan pelatihan bagi warga Kelurahan Kademangan)	
2	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI / 'Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Probolinggo	-		1 paket	belum pernah mengikuti pelatihan	

3.1 TELAHAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional, sistem perencanaan pembangunan Provinsi serta sistem perencanaan pembangunan Kota Probolinggo. Oleh karena itu, Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo dengan mengacu pada :

- a. Rencana Kerja Prioritas (RKP) 2026 pada prioritas Nasional 6 – PN 6 yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan
- b. RKPD Provinsi Jawa Timur 2026 pada prioritas Provinsi 1 – PP 1 yaitu JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan
- c. RKPD Kota Probolinggo 2026 pada Prioritas Kota 2 – PK 2 yaitu peningkatan ketahanan sosial masyarakat untuk mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dengan arah kebijakan:
 1. Peningkatan kompetensi tenaga kerja berdasarkan kebutuhan pasar kerja serta perluasan akses lapangan kerja produktif
- d. Rencana Kerja Prioritas (RKP) pada prioritas 5 yaitu Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri dengan arah kebijakan :
 1. pengembangan hilirisasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru
 2. penguatan industri padat karya berkelanjutan, industri dasar, dan industri strategis nasional
 3. pengembangan integrasi ekonomi domestik dan global
- e. RANWAL RKPD Jawa Timur pada prioritas 2 yaitu Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi dengan arah kebijakan :
 1. Milenial Job Center
 2. Pelatihan Kerja di 16 UPT BLK
 3. Job Market Fair
 4. Revitalisasi UPT BLK

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

3.2.1 TUJUAN

Dalam rangka mendukung upaya mengembangkan sasaran yang ingin dicapai oleh suatu organisasi, perlu dirumuskan beberapa tujuan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun mendatang dengan asumsi bahwa Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo tetap konsisten dengan tujuan yang dikembangkan dalam periode tersebut. Tujuan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo yaitu :

Tenaga Kerja yang kompeten dan berdaya saing serta peningkatan produktivitas sektor Industri

Penetapan tujuan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo pada umumnya didasarkan pada isu-isu strategis. Tujuan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dalam kurun waktu tahun 2025

- 2026 dan mengarahkan perumusan sasaran, program dan kegiatan sebagaimana terkait pada IKU Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sebagai berikut

Tabel 3.2 IKU

Tabel

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024	TARGET KINERJA TAHUN 2026
1	Tenaga Kerja yang kompeten dan berdaya saing serta peningkatan produktivitas sektor Industri		Tingkat Pengangguran Terbuka	Capaian Indikator Tujuan 1	Target Indikator Tujuan 1
		1. Meningkatnya Kesempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	71,01%	71,05%
			Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	62,52%	64,45%
		2. Meningkatnya Daya Saing Sektor Industri	Persentase Peningkatan Nilai Produksi Sektor Industri	0,89 %	0,90 %
		3. Meningkatnya Kinerja Penyelenggara n Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Daerah) pada Disperinnaker sesuai ketentuan	76,69 %	76,75 %

3.2.2 SASARAN

Sasaran strategis adalah penjabaran dari Tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo dalam kurun waktu satu tahun.

Penetapan sasaran dirumuskan lebih spesifik, terukur, berorientasi pada hasil, dapat dicapai, dan memiliki kurun waktu satu tahun. Dalam Sasaran dirancang pula **Indikator Pencapaian Sasaran**, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang telah diidentifikasi untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan dan disertai dengan targetnya masing-masing.

Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, serta berdasarkan arahan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo yang akan diwujudkan dalam kurun waktu sampai dengan 2 (dua) tahun terakhir (2025 - 2026), ditetapkan sebagai berikut

- a. Meningkatnya nilai produksi sektor industri;
- b. Meningkatnya penempatan tenaga kerja pada sector formal dan informal;
- c. Meningkatnya perlindungan tenaga kerja.
- d. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tahun 2026

Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, Indikator, target dan pagu indikatif

1. Program Rencanaan Tenaga Kerja

Kegiatan	: Penyusunan Renacana Kerja (RTK)
Indikator, outcame	: Jumlah Dokumen Rencana Tenaga
Kerja Makro Sub Kegiatan	: Penyusunan Rencana Tenaga Kerja
Makro Indikator	: Jumlah DokumenRencana Tenaga Kerja Makro

2. Pogram Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja

Kegiatan	: Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan
Indikator , outcame	: Prosentase Pencari kerja yang

- | | | |
|------------------|---|--|
| 1. Sub Kegiatan | : | Proses Pelaksanaan Produktivitas dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari kerja berdasarkan klaster Kompetensi |
| Indikator | : | Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat Berbasis Kompetensi . |
| 2. Sub. Kegiatan | : | Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerjasama dengan sektor swasta untuk menyediakan instruktur serta sarana dan prasarana Lembaga pelatihan kerja. |
| Indikator | : | Jumlah kesepakatan/koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana prasarana Pelatihan vokasi dan produktifitas |

1. Program Penempatan Tenaga Kerja

- | | | |
|--------------------|---|---|
| 1. Kegiatan | : | Pelayanan antar kerja di daerah kabupaten/kota |
| Indikator, outcame | : | Prosentase Tenaga Kerja yang |
| Sub. Kegiatan | : | Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan |
| Indikator, outcame | : | Jaminan Tenaga Kerja Disabilitas yang mendapatkan Fasilitras layanan ULD |
| Sub Kegiatan | : | Perluasan Kesempatan Kerja |
| Indikator, oucame | : | Jumlah tenaga kerja yang di berdayakan melalui Program perluasan kesempatan kerja |
| 2. Kegiatan | : | Pengedlolaan Informasi Pasar Kerja |
| Indikator | : | Prosentase pencari kerja yang mendapatkan fasilitas Informasi pasar kerja |
| Sub. Kegiatan | : | Job Fair/Bursa Kerja |
| Indikator, outcame | : | Jumlah Pencari Kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui Job Fair/ Bursa Kerja |

2. Program Hubungan Industrial

1. Kegiatan : Pengelolaan Peraturan Perusahaan dan pendaftaran Perjanjian kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota

Indikator, outcome : Prosentase Perusahaan yang telah menetapkan Peraturan Perusahaan terkait Hubungan Industrial dan Pendaftaran Perjanjian Kinerja Bersama.
2. Kegiatan : Pelayanan antar kerja di daerah kabupaten/kota

Indikator, outcome : Prosentase Tenaga Kerja yang mendapatkan Fasilitas Penempatan Tenaga Kerja

Sub. Kegiatan : Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan.

Indikator, outcome : Jumlah data dan informasi sarana HI (PP/PKB, struktur skala Upah, dan LKS Bilpartit) dan pekerja yang terdaftar sebagai peserta Jamsostek serta pengupahan
3. Kegiatan : Pencegahan dan penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial, mogok kerja dan penutupan Perusahaan disaerah kabupaten Kota

Indikator, outcome : Prosentase Penurunan kasus perselisihan hubungan Industrial

Sub. Kegiatan : Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mogok Kerja Dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat /Berdampak pada Kepentingan di satu (1) Daerah Kab/Kota

Indikator, outcome : Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan

3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Indikator, outcome : Prosentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80 %
- a. Sub. Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah Indikator, outcome : Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah
- b. Sub Kegiatan : Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja
- c. Indikator, outcome : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Indikator, outcome : Prosentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai Ketentuan
- a. Sub Kegiatan : Penyediaan gaji dan tunjangan
Indikator, outcome : Jumlah orang menerima gaji dan tunjangan ASN
- b. Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan Daerah
Indikator, outcome : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- c. Sub Kegiatan : koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/semesteran SKPD

- | | | | |
|--|--------------------|---------------------------|-------|
| | Indikator, outcome | : Jumlah Laporan Keuangan | Bulan |
|--|--------------------|---------------------------|-------|
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

	Indikator, outcome	: Prosentase Administrasi BMD Perangkat Daerah sesuai ketentuan.	
	Sub Kegiatan	: Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
	Indikator, outcome	: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

	Indikator, outcome	: Prosentase Administrasi	Kep
	Sub Kegiatan	: Monitoring, Evaluasi dan penilaian Kinerja Pegawai	
	Indikator, outcome	: Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan penilaian Kinerja Pegawai	
 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

	Indikator, outcome	: Prosentase Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai Ketentuan	
a.	Sub Kegiatan	: Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor	
	Indikator, outcome	: Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan.	
b.	Sub Kegiatan	: Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	
	Indikator, outcome	: Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	
c.	Sub Kegiatan	: Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	
	Indikator, outcome	: Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-	
d.	Sub Kegiatan	: fasilitasi Kunjungan Tamu	
	Indikator, outcome	: Jumlah laporan Fasilitasi kunjungan tamu.	

- e. Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
Indikator, outcome : Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
 - f. Sub Kegiatan : Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
Indikator, outcome : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 - g. Sub Kegiatan : Dukungan Pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD
Indikator, outcome : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Indikator, outcome : Prosentase BMD Perangkat sesuai ketentuan
Sub Kegiatan : Pengadaan peralatan dan mesin
Indikator, outcome : Jumlah Unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah
Indikator, outcome : Prosentase Jasa Penunjang Perangkat Daerah sesuai ketentuan
- a. Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi , sumber daya air
Indikator, outcome : Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi , sumber daya air.
 - b. Sub Kegiatan : Jasa Pelayanan Umum Kantor
Indikator, outcome : Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. Pemeliharaan barang milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator, outcome	:	Prosentase BMD dalam kondisi baik
a. Sub Kegiatan	:	Penyediaan Jasa pemeliharaan , biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau Dinas Kendaraan Dinas Jabatan
Indikator, outcome	:	Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau Dinas Kendaraan Dinas Jabatan yang di pelihara dan dibayarkan pajaknya.
b. Sub Kegiatan	:	Pemeliharaan dan Mesin
Indikator, outcome	:	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara.
c. Sub Kegiatan	:	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya
Indikator, outcome	:	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi

4. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Kegiatan	:	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
Indikator , outcome	:	Prosentase Rencana Pembangunan Industri yang Dilaksanakan
a. Sub Kegiatan	:	Koordinasi , sinkronisasi dan Pembangunan Sumber Daya Industri
Indikator, outcome	:	Jumlah Dokumen hasil koordinasi , sinkronisasi dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri.
b. Sub Kegiatan	:	Koordinasi , sinkronisasi dan pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
Indikator, outcome	:	Jumlah Dokumen hasil koordinasi , sinkronisasi dan pelaksanaan Pembangunan sarana dan prasarana industry.
c. Sub Kegiatan	:	Koordinasi , sinkronisasi dan pelaksanaan Pembangunan Industri dan peran serta masyarakat
Indikator, outcome	:	Jumlah Dokumen hasil koordinasi , sinkronisasi dan pelaksanaan Pembangunan industry dan peran serta Masyarakat.
d. Sub Kegiatan	:	Evaluasi terhadap Pelaksanaan rencana Pembangunan industri
Indikator, outcome	:	Jumlah Dokumen Evaluasi terhadap Pelaksanaan rencana Pembangunan industry.

5. **Program Pengendalian Izin Usaha Industri**

Kegiatan	: Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) Dan izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota.
Indikator Indikator	: Prosentase Izin Usaha Industri (IUI), izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang diterbitkan sesuai ketentuan.
Sub Kegiatan	: Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap perizinan berusaha sektor Perindustrian yng menjadi kewenangan Kabupaten/Kota
Indikator, outcome	: Jumlah Dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pengawasan terhadap perizinan berusaha industry dengan skala usaha industry kecil dan industry menengah yang berlokasi di satu Kab/Kota sepanjang meruapakan penanaman modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.

6. **Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional**

Kegiatan	: Penyediaan Informasi Industri untuk informasi Industri untuk
----------	--

	IUI, IPUI,IUK dan IPKI Kewenagnan.
Indikator, outcame	: Prosentase Data Industri yang dikelola dengan SINAS (Sistem Informasi Industri Nasional)
Sub Kegiatan	: Fasilitas i Pengumpulan , Pengolahan dan Analis Data Industri, Data Kawasan Industri serta data lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SINas)

Sesuai amanat Peraturan daerah Kota Probolinggo No.2 tahun 2020 Tentang Pengarustamaan gender terdapat beberapa program dan mengamodir responsif gender yaitu program pelatihan kerja dan produktif tenaga kerja, program penempatan tenaga kerja, program hubungan industrial, program perencanaan dan pembangunan industri.

Adapun rumusan renacana program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota probolinggo Tahun 2026 dan perkiraan maju tahun 2027 disajikan sebagai mana tabel T-C 33 sebagai berikut:

Tabel T-C.33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026

dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Kota Probolinggo

DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA PROBOLINGGO

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2026)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) (Tahun 2026)	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Perkiraan Maju		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2027
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				14.585.769.588				15.985.845.632
2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	Kota Probolinggo	100	8.428.842.572		Kota Probolinggo	100	9.253.851.829
2	07	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%	Kota Probolinggo	100	47.139.592		Kota Probolinggo	100	51.853.551

2	07	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Probolinggo	10	35.089.592		Kota Probolinggo	10	Rp38.598.551
2	07	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Probolinggo	10	12.050.000		Kota Probolinggo	10	Rp13.255.000
2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	Kota Probolinggo	100	7.614.819.220		Kota Probolinggo		8.376.301.142
2	07	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Probolinggo	61	7.467.744.628		Kota Probolinggo	61	Rp8.214.519.091
2	07	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Probolinggo	12	118.109.000		Kota Probolinggo	12	Rp129.919.900
2	07	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran	Kota Probolinggo	12	28.965.592		Kota Probolinggo	12	Rp31.862.151

						SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD							
2	07	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi BMD Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	Kota Probolin ggo	12	6.350.000		Kota Probolin ggo	12	6.985.000
2	07	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Probolinggo	12	6.350.000		Kota Probolinggo	12	Rp6.985.000
2	07	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	Kota Probolin ggo	12	17.150.000		Kota Probolin ggo	12	990.000,00
3	31	01	2,05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Probolinggo	1 Paket	16.250.000		Kota Probolinggo	1 Paket	17.875.000,00
2	07	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kota Probolinggo	12	900.000		Kota Probolinggo	12	990.000

2	07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	Kota Probolinggo	12	146.439.360		Kota Probolinggo	12	161.083.296
2	07	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Probolinggo	4	39.119.000		Kota Probolinggo	4	Rp43.030.900
2	07	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Probolinggo	2	2.500.000		Kota Probolinggo	2	Rp2.750.000
2	07	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Probolinggo	12	15.000.000		Kota Probolinggo	12	Rp16.500.000
2	07	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Probolinggo	4	5.000.000		Kota Probolinggo	4	Rp5.500.000
2	07	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Probolinggo	12	58.090.360		Kota Probolinggo	12	Rp63.899.396
2	07	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Probolinggo	1	1.500.000		Kota Probolinggo	1	Rp1.650.000

2	07	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Probolinggo	12	25.230.000		Kota Probolinggo	12	Rp27.753.000
2	07	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan BMD Perangkat Daerah yang terpenuhi	Kota Probolin ggo	1	15.000.000		Kota Probolin ggo	1	16.500.000
2	07	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Probolinggo	10	15.000.000		Kota Probolinggo	10	Rp16.500.000
2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Kebutuhan Ketatalaksanaan yang Terpenuhi	Kota Probolin ggo	12	427.932.760		Kota Probolin ggo	12	470.726.036
2	07	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Probolinggo	12	118.890.000		Kota Probolinggo	12	Rp130.779.000
2	07	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Probolinggo	12	309.042.760		Kota Probolinggo	12	Rp339.947.036

2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan BMD dalam kondisi baik	Kota Probolinggo	12	154.011.640		Kota Probolinggo	12	169.412.804
2	07	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Probolinggo	19	63.311.640		Kota Probolinggo	19	Rp69.642.804
2	07	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Probolinggo	40	15.700.000		Kota Probolinggo	40	Rp17.270.000
3	31	01	2,09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			1	75.000.000		Kota Probolinggo	1	Rp82.500.000
2	07	02			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK) yang ditetapkan	Kota Probolinggo	1	85.000.000		Kota Probolinggo	1	Rp93.500.000
2	07	02	2,01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	Kota Probolinggo	1	85.000.000		Kota Probolinggo	1	Rp93.500.000
2	07	02	2,01	0001	2.07.02.2.01.0001 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana	Kota Probolinggo	1	85.000.000		Kota Probolinggo	1	Rp93.500.000

						Tenaga Kerja Makro							
2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktifitasnya	Kota Probolinggo	90.3	3.633.723.511		Kota Probolinggo	90.3	3.997.095.862
2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan Fasilitas Pelatihan Berbasis Kompetensi	Kota Probolinggo	90.3	3.633.723.511		Kota Probolinggo	90.3	3.997.095.862
2	07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Kota Probolinggo	16	3.416.854.327		Kota Probolinggo	16	Rp3.758.539.760
2	07	03	2.01	02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	Kota Probolinggo	12	216.869.184		Kota Probolinggo	12	Rp238.556.102

2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri	Kota Probolin ggo	90.3	152.752.000		Kota Probolin ggo	90.3	127.401.285
2	07	04	2.01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga Kerja yang mendapatkan Fasilitas Penempatan Tenaga Kerja	Kota Probolin ggo	90.3	112.752.000		Kota Probolin ggo	90.3	83.401.285
2	07	04	2.01	0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	Kota Proboling go		36.932.650,00				
2	07	04	2.01	05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Kota Proboling go	25	75.819.350,00		Kota Proboling go	25	Rp83.401.285
2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan fasilitas Informasi Pasar Kerja	Kota Probolin ggo	90.3	40.000.000		Kota Probolin ggo	90.3	44.000.000
2	07	04	2.03	03	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan	Kota Proboling go	125	40.000.000		Kota Proboling go	125	Rp44.000.000

						Melalui Job Fair/Bursa Kerja							
2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang menerapkan perlindungan hak hak pekerja dan dialog sosial	Kota Probolin ggo	72	2.370.451.505		Kota Probolin ggo	72	2.607.496.656
							Kota Probolin ggo	52			Kota Probolin ggo	52	
2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perusahaan yang telah menetapkan Peraturan Perusahaan terkait Hubungan Industrial dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama	Kota Probolin ggo	130	2.269.431.500		Kota Probolin ggo	130	2.496.374.650
2	07	05	2.01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Kota Proboling go	80	2.269.431.500		Kota Proboling go	80	Rp2.496.374.650

2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penurunan kasus perselisihan hubungan industrial	Kota Probolin ggo	79	101.020.005		Kota Probolin ggo	79	111.122.006
2	07	05	2.02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	Kota Proboling go	7	101.020.005		Kota Proboling go	7	Rp111.122.006
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				769.311.048				846.242.153
3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Realisasi Investasi Sektor industri dan Kawasan Industri	Kota Probolin ggo	82%	744.613.121		Kota Probolin ggo	82%	819.074.433
3	31	02	2.01		Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase Rencana Pembangunan Industri yang dilaksanakan	Kota Probolin ggo	82	744.613.121		Kota Probolin ggo	82	819.074.433
3	31	02	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kota Proboling go	4	64.079.184		Kota Proboling go	4	Rp70.487.102
3	31	02	2.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,	Kota Proboling go	8	662.012.159		Kota Proboling go	8	Rp728.213.375

						Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri							
3	31	02	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kota Probolinggo	2	16.871.778		Kota Probolinggo	2	Rp18.558.956
3	31	02	2.01	06	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Kota Probolinggo	1	1.650.000		Kota Probolinggo	1	Rp1.815.000
3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	Kota Probolin ggo	60%	11.628.097		Kota Probolin ggo	60%	12.790.907
3	31	03	2.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan	Kota Probolin ggo	60%	11.628.097		Kota Probolin ggo	60%	12.790.907

						Industri (IPKI) yang diterbitkan sesuai ketentuan							
3	31	03	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Kota Probolinggo	10	11.628.097		Kota Probolinggo	10	Rp12.790.907
3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	Kota Probolinggo	70%	13.069.830		Kota Probolinggo	70%	Rp14.376.813

3	31	04	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Data Industri yang dikelola dengan SIINAS (Sistem Informasi Industri Nasional)	Kota Probolin ggo	70%	13.069.830		Kota Probolin ggo	70%	Rp14.376.813
3	31	04	2.01	01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Kota Proboling go	4	13.069.830		Kota Proboling go	4	Rp14.376.813
JUMLAH													15.440.080.636

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Program prioritas yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah mengacu pada program prioritas pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2025- 2029, di mana prioritas program tersebut telah menggambarkan target indikator capaian kinerja selama 5 (lima) tahun. Program prioritas pembangunan daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dijabarkan oleh Perangkat Daerah dalam Renstra Perangkat Daerah, masing-masing program dijabarkan kedalam kegiatan disertai pagunya.

Setiap program prioritas harus memiliki indikator kinerja yang jelas dan dapat diukur tingkat capaiannya. Pencapaian kinerja program merupakan akumulasi dari pencapaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan. Selanjutnya, program prioritas dan pagu indikatif yang telah ditetapkan untuk rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah, disampaikan ke Organisasi Pemerintah Daerah sesuai program terkait beserta pagu indikatif untuk diproses lebih lanjut untuk mendapatkan kegiatan prioritas masing-masing program dimaksud. Dalam penyusunan prioritas kegiatan Organisasi Pemerintah Daerah juga memperhatikan kegiatan yang telah disusun dalam dokumen Renstra Organisasi Pemerintah Daerah sehingga terjadi keselarasan dalam penyusunan program dan kegiatan yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah. Program, capaian kinerja, beserta pagu indikatifnya, sebagaimana tabel T-C.33.

Pada tahun 2026 Dinas Perindustri dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo merumuskan 2 (dua) urusan, 8 (Delapan) program, 17 (tujuh belas) kegiatan dan 33 (tiga puluh tiga) sub kegiatan. Total keseluruhan kebutuhan dana sesuai dengan pagu indikatif yang telah ditetapkan adalah sebesar Rp. **15.440.080.636** dengan sumber dana dari DAU

TABLE PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2024

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026
dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Kota Probolinggo
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA PROBOLINGGO

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2026)	Rencana Tahun 2026		Catatan Penting	Perkiraan Maju		
						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2027
1					2	5	6	7	8	9	10
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA		14.619.195.548				16.022.614.188
2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100	8462268532		Kota Probolinggo	100	9.290.620.385
2	07	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	47.139.592		Kota Probolinggo	100	51.853.551
2	07	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	35.089.592		Kota Probolinggo	10	Rp38.598.551

2	07	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10	12.050.000		Kota Probolinggo	10	Rp13.255.000
2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	7.614.819.220		Kota Probolinggo		8.376.301.142
2	07	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	61	7.467.744.628		Kota Probolinggo	61	Rp8.214.519.091
2	07	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	118.109.000		Kota Probolinggo	12	Rp129.919.900
2	07	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12	28.965.592		Kota Probolinggo	12	Rp31.862.151
2	07	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12	6.350.000		Kota Probolinggo	12	6.985.000
2	07	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	6.350.000		Kota Probolinggo	12	Rp6.985.000
2	07	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12	17.150.000		Kota Probolinggo	12	990.000,00
3	31	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	16.250.000		Kota Probolinggo	1 Paket	17.875.000,00
2	07	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12	900.000		Kota Probolinggo	12	990.000
2	07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	12	146.439.360		Kota Probolinggo	12	161.083.296
2	07	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4	39.119.000		Kota Probolinggo	4	Rp43.030.900

2	07	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2	2.500.000		Kota Probolinggo	2	Rp2.750.000
2	07	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12	15.000.000		Kota Probolinggo	12	Rp16.500.000
2	07	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4	5.000.000		Kota Probolinggo	4	Rp5.500.000
2	07	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	58.090.360		Kota Probolinggo	12	Rp63.899.396
2	07	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	1.500.000		Kota Probolinggo	1	Rp1.650.000
2	07	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12	25.230.000		Kota Probolinggo	12	Rp27.753.000
2	07	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	15.000.000		Kota Probolinggo	1	16.500.000
2	07	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10	15.000.000		Kota Probolinggo	10	Rp16.500.000
2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	427.932.760		Kota Probolinggo	12	470.726.036
2	07	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	118.890.000		Kota Probolinggo	12	Rp130.779.000
2	07	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	309.042.760		Kota Probolinggo	12	Rp339.947.036
2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	187.437.600		Kota Probolinggo	12	206.181.360
2	07	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan	19	88.437.600		Kota Probolinggo	19	Rp97.281.360
2	07	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40	24.000.000		Kota Probolinggo	40	Rp26.400.000

3	31	01	2,09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	75.000.000		Kota Probolinggo	1	Rp82.500.000
2	07	02			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	1	85.000.000		Kota Probolinggo	1	Rp93.500.000
2	07	02	2,01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	1	85.000.000		Kota Probolinggo	1	Rp93.500.000
2	07	02	2,01	0001	2.07.02.2.01.0001 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	1	85.000.000		Kota Probolinggo	1	Rp93.500.000
2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	90.3	3.633.723.511		Kota Probolinggo	90.3	3.997.095.862
2	07	03	2,01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	90.3	3.633.723.511		Kota Probolinggo	90.3	3.997.095.862
2	07	03	2,01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	16	3.416.854.327		Kota Probolinggo	16	Rp3.758.539.760
2	07	03	2,01	02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	12	216.869.184		Kota Probolinggo	12	Rp238.556.102
2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	90.3	152.752.000		Kota Probolinggo	90.3	127.401.285
2	07	04	2,01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	90.3	112.752.000		Kota Probolinggo	90.3	83.401.285
2	07	04	2,01	0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan		36.932.650,00		Kota Probolinggo		
2	07	04	2,01	05	Perluasan Kesempatan Kerja	25	75.819.350,00		Kota Probolinggo	25	Rp83.401.285

2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	90.3	40.000.000		Kota Probolinggo	90.3	44.000.000
2	07	04	2.03	03	Job Fair/Bursa Kerja	125	40.000.000		Kota Probolinggo	125	Rp44.000.000
2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	72	2.370.451.505		Kota Probolinggo	72	2.607.496.656
						52			Kota Probolinggo	52	
2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	130	2.269.431.500		Kota Probolinggo	130	2.496.374.650
2	07	05	2.01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	80	2.269.431.500		Kota Probolinggo	80	Rp2.496.374.650
2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	79	101.020.005		Kota Probolinggo	79	111.122.006
2	07	05	2.02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	7	101.020.005		Kota Probolinggo	7	Rp111.122.006
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN		769.311.048				846.242.153
3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	82%	744.613.121		Kota Probolinggo	82%	819.074.433
3	31	02	2.01		Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	82	744.613.121		Kota Probolinggo	82	819.074.433
3	31	02	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	4	64.079.184		Kota Probolinggo	4	Rp70.487.102

3	31	02	2.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	8	662.012.159		Kota Probolinggo	8	Rp728.213.375
3	31	02	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	2	16.871.778		Kota Probolinggo	2	Rp18.558.956
3	31	02	2.01	06	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1	1.650.000		Kota Probolinggo	1	Rp1.815.000
3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	60%	11.628.097		Kota Probolinggo	60%	12.790.907
3	31	03	2.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	60%	11.628.097		Kota Probolinggo	60%	12.790.907
3	31	03	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	10	11.628.097		Kota Probolinggo	10	Rp12.790.907
3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	70%	13.069.830		Kota Probolinggo	70%	Rp14.376.813
3	31	04	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	70%	13.069.830		Kota Probolinggo	70%	Rp14.376.813
3	31	04	2.01	01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	4	13.069.830		Kota Probolinggo	4	Rp14.376.813
JUMLAH							15.440.080.636				15.440.080.636

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo Tahun 2025 merupakan landasan fundamental dalam rangka menjamin konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Selain itu Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo Tahun 2026 merupakan pengendali dan pengevaluasi pelaksanaan kegiatan di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo tahun lalu dan sebagai acuan untuk kegiatan yang akan datang.

Undang-undang jangka Panjang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan rencana pembangunan tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat undang-undang tersebut dijabarkan kedalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo harus selalu menjaga kualitas kinerja, karena hal tersebut akan terkait langsung dengan kualitas sumber daya manusia aparatur Pemerintah di Kota Probolinggo. Dengan terselesainya Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo Tahun 2026 ini semoga dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat khususnya masyarakat Kota Probolinggo.

Probolinggo, 4 Agustus 2025



BUDIONO WIRAWAN, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda

Nip. 19691220 199003 1 009